

Relevansi Ekonomi Islam dengan Ekonomi Pertahanan Dalam Kerangka Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas dan Tambang di Indonesia: *Systematic Literature Review* dan Analisis Bibliometrik

Lucky Agusta¹, Sri Murtiana², Endang Purwaningsih³

^{1,2,3} Universitas Pertahanan RI

E-mail: lucky.agusta@mp.idu.ac.id

Article History:

Received: 01 Agustus 2026

Revised: 02 Oktober 2026

Accepted: 12 Oktober 2026

Keywords: *ekonomi Islam; ekonomi pertahanan; sumber daya alam; Systematic Literature Review; analisis bibliometrik*

Abstract: *Pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi (migas) serta mineral dan batubara (minerba) memiliki peran strategis dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), memperkuat kapasitas fiskal negara, dan mendukung ekonomi pertahanan. Namun, tata kelola sektor tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti korupsi, ketidaksempurnaan regulasi, dan belum optimalnya pemanfaatan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi ekonomi Islam dengan ekonomi pertahanan dalam kerangka pengelolaan sumber daya alam migas dan tambang di Indonesia. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan protokol PRISMA 2020 yang dipadukan dengan analisis bibliometrik menggunakan VOSviewer. Sebanyak 44 artikel dianalisis melalui SLR, sedangkan 273 artikel digunakan sebagai basis data analisis bibliometrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literatur internasional didominasi tema energi global dan keuangan Islam, sedangkan literatur nasional berfokus pada tata kelola sumber daya alam, PNBP, dan kebijakan fiskal. Analisis juga mengidentifikasi kesenjangan penelitian berupa belum terintegrasinya ekonomi Islam, ekonomi pertahanan, dan tata kelola sumber daya alam dalam satu kerangka konseptual. Penelitian ini menawarkan sintesis konseptual yang menempatkan tata kelola migas dan tambang sebagai penghubung antara ekonomi Islam dan ekonomi pertahanan melalui prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan keberlanjutan guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional sebagai fondasi pertahanan negara.*

PENDAHULUAN

Ketahanan pertahanan modern mensyaratkan tidak hanya kapabilitas militer tetapi juga

ketahanan fiskal yang andal dan legitimasi atas pemanfaatan aset strategis. Pembiayaan Pertahanan Negara sebagai “*public goods*” atau barang publik merupakan tanggung jawab Pemerintah melalui kebijakan fiskal (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Yusgiantoro, 2014) . Oleh karenanya pembiayaan pertahanan negara sangat tergantung pada kapasitas pembiayaan fiskal suatu negara. Pada kasus di Jerman ditemukan adanya preferensi yang saling bergantung di masyarakat, yaitu pembiayaan melalui *tax-based fiscal expansion* atau dengan *debt-issuance-based fiscal deficit* (Bolouri et al., 2025). Salah satu strategi dalam upaya meningkatkan kapasitas fiskal adalah optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sebagai pendamping dari penerimaan Pajak dalam APBN (Zulkadri et al., 2025). Sumber PNBP ini diantaranya diperoleh dari sektor minyak dan gas (migas) dan mineral dan batubara (minerba) yang signifikan jumlahnya di Indonesia, selain juga dari Dana Bagi Hasil (DBH).

Hal ini dapat dilihat dari grafik pada gambar 1 yang mengilustrasikan kontribusi PNBP sektor migas dan minerba terhadap total PNBP Nasional.

Gambar 1 Kontribusi PNBP Sumber Daya Alam (SDA) (Migas dan Minerba) Terhadap Total PNBP Nasional tahun 2020 s.d. 2024 (dalam Milyar Rp.)



Sumber: (BPS RI, 2024), diolah

Rata-rata kontribusi dari sektor ini mencapai 38% pada 5 tahun terakhir, porsi terbesar dari 3 komponen lain penyumbang PNBP total (PNBP dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan, Badan Layanan Umum dan PNBP lainnya). Namun, capaian tersebut bukan tanpa kendala dan permasalahan. Banyak kalangan yang menilai bahwa hasil yang dicapai sektor ini belum optimal disebabkan banyaknya permasalahan.

Setidaknya ada 2 (dua) penyebab utama dari permasalahan ini, kasus korupsi pada tata kelola sektor ini yang mengakibatkan sejumlah dampak buruk lainnya dan ketidaksempurnaan regulasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan bahwa terdapat 27 kasus korupsi pada sektor SDA yang sudah berhasil ditangani dalam 10 tahun terakhir ini, yang apabila tidak tertangani menyebabkan adanya tunggakan pembayaran PNBP, pungutan liar dalam tata kelola migas dan minerba serta tidak validnya perhitungan bagian Pemerintah yang seharusnya diterima dari sektor ini (*government take*) (Capri et al., 2021) . Ketidaksempurnaan regulasi pada tata

kelola sektor ini juga tidak kalah penting dalam menyumbang tidak optimalnya pendapatan negara tersebut. Seperti pada perubahan regulasi minerba dari Undang-Undang (UU) Nomor 4 tahun 2009 kepada UU Nomor 3 tahun 2020, yang berdasarkan kajian beberapa ahli dapat berpotensi memunculkan ketidakadilan sosial di masyarakat melalui “*state capture*” dengan para oligarki sebagai pelaku utamanya. Sehingga, perubahan regulasi tersebut seolah mewadahi praktek korupsi dalam tata kelola minerba itu sendiri (Umam et al., 2021). Regulasi dalam tata kelola migas pun tak luput dari tantangan menurunnya produksi dalam negeri (fenomena “*sunset period*”), namun di sisi lain permintaan dalam negeri terus meningkat dan konversi menuju energi baru terbarukan (Manohara & Hayati, 2022).

Kesulitan demi kesulitan selalu datang dalam upaya pengelolaan SDA migas dan minerba ini, namun Pemerintah RI akan tetap menghadapinya dan tidak tinggal diam untuk menghadapi kesulitan dan tantangan itu (Subianto, 2023). Presiden RI Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa Pemerintahan yang dipimpinnya akan bersama rakyat untuk membangun Negara dan mendukung ekonomi kerakyatan. Terlebih pada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan syariah dan pertahanan negara berkesimpulan ekonomi kerakyatan syariah dapat diterapkan sebagai pertahanan ekonomi negara melalui regulasi yang komprehensif (Afifullah & Triadi, 2023). Tulisan ini bermaksud menautkan 3 (tiga) literatur, yaitu (1) ekonomi ekstraktif dan fiskal (*government take*, PNB/DBH), (2) ekonomi pertahanan (kebutuhan pembiayaan stabil untuk ketahanan nasional), dan (3) prinsip ekonomi islam (amanah, anti-gharar, larangan riba, dan keadilan distributif (U. M. Chapra, 2000)). Kontribusi utama adalah merumuskan penerapan nilai-nilai dan instrumen syariah untuk memperbaiki distribusi penerimaan, mengurangi sengketa kontraktual yang menggerogoti penerimaan negara dalam tata kelola migas dan minerba di Indonesia, serta mengetahui lebih lanjut mengenai mekanisme pembiayaan etis dan berkelanjutan untuk kebutuhan pertahanan dan reklamasi lingkungan dengan menggunakan analisis Bibliometrik.

LANDASAN TEORI

Paradigma ekonomi Islam menekankan bahwa sumber daya alam merupakan amanah dari Allah SWT. Chapra (2000) menegaskan bahwa “tujuan utama ekonomi Islam bukan sekadar meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melainkan menciptakan pembangunan yang mampu menghadirkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat”. Landasan *maqāsid al-syarī‘ah* memperkuat pandangan tersebut, sebagaimana ditegaskan Al-Ghazali (1997) bahwa “kemaslahatan diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta”. Sejalan dengan itu, Al-Shatibi (1920) menegaskan bahwa “seluruh kebijakan publik seharusnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara luas”. Pengelolaan sumber daya alam termasuk bagian dari *hifz al-māl* dalam konteks ekonomi publik Islam, yang berarti menjaga aset negara agar dimanfaatkan secara efisien, transparan, dan berkeadilan.

Prinsip amanah menjadi dasar penting dalam tata kelola sumber daya alam. Beekun (2006) menekankan bahwa “amanah merupakan fondasi utama etika bisnis Islam karena setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh keputusan dan tindakan yang dilakukan”. Pelanggaran terhadap amanah, seperti praktik korupsi dan kebocoran penerimaan negara, tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga melemahkan kapasitas fiskal negara. Selain itu, prinsip keadilan distributif menuntut agar manfaat ekonomi dari sumber daya didistribusikan secara proporsional. Chapra (2000) menekankan bahwa “distribusi kekayaan yang adil merupakan salah

satu tujuan utama pembangunan ekonomi Islam karena ketimpangan distribusi akan mengurangi kesejahteraan sosial dan berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat”.

Larangan gharar juga relevan dalam tata kelola sumber daya alam. Ayub (2009) menegaskan bahwa “gharar mencakup seluruh bentuk transaksi yang mengandung informasi yang tidak lengkap, objek yang tidak jelas, hak dan kewajiban yang tidak transparan, maupun ketentuan kontrak yang berpotensi menimbulkan perselisihan di kemudian hari”. Ketidakjelasan kontrak dan lemahnya regulasi dalam sektor migas dan minerba berpotensi menimbulkan sengketa hukum serta mengurangi penerimaan negara. Demikian pula dengan larangan *riba*, yang memberikan kerangka etis dalam pembiayaan negara. Chapra (2000) menegaskan bahwa “praktik *riba* bertentangan dengan prinsip keadilan karena memberikan keuntungan kepada salah satu pihak tanpa adanya pembagian risiko yang seimbang”. Iqbal & Mirakhor (2011) menambahkan bahwa “sistem keuangan syariah menekankan mekanisme *risk sharing* dibandingkan *risk transfer*”.

Dalam perspektif ekonomi publik, pertahanan negara dipandang sebagai barang publik. Samuelson (1955) mendefinisikan barang publik sebagai “*barang yang memiliki sifat non-rivalry dan non-excludability*”, yang berarti konsumsi oleh satu individu tidak mengurangi manfaat bagi individu lain dan tidak ada mekanisme pengecualian. Pertahanan negara merupakan contoh klasik barang publik karena manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Stiglitz & Rosengard (2015) menegaskan bahwa “kegagalan pasar dalam penyediaan barang publik menjadi dasar utama legitimasi intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal”.

Ketahanan fiskal menjadi prasyarat utama keberlanjutan pembiayaan pertahanan. IMF (2022) menjelaskan bahwa “ketahanan fiskal tercermin dari kemampuan pemerintah dalam mengelola penerimaan, belanja, pembiayaan, dan utang secara berimbang sehingga tetap memiliki ruang fiskal yang memadai ketika menghadapi guncangan ekonomi maupun kebutuhan belanja yang meningkat”. Optimalisasi PNBPN dari sektor migas dan minerba yang berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara menjadi strategi penting untuk memperkuat kapasitas fiskal dalam konteks Indonesia. Yusgiantoro (2014) menegaskan bahwa “ekonomi pertahanan tidak dapat dilepaskan dari kemampuan fiskal negara dalam menjamin keberlanjutan pembiayaan pertahanan”. Sintesis ini pada akhirnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam (amanah, maqāṣid, keadilan distributif, larangan *gharar*, larangan *riba*, dan keuangan publik Islam) berpadu dengan teori barang publik dan konsep ketahanan fiskal dalam menjelaskan pentingnya tata kelola sumber daya alam yang optimal. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya memiliki dimensi normatif, tetapi juga memberikan legitimasi teoritis terhadap peran negara dalam memperkuat kapasitas fiskal dan menjamin keberlanjutan pembiayaan pertahanan sebagai barang publik yang esensial bagi seluruh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau tinjauan pustaka. Pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) digunakan dalam melakukan studi literatur pada penelitian ini untuk mengurangi bias semaksimal mungkin melalui penelusuran literatur secara menyeluruh terhadap hasil studi/penelitian, yang secara ilmiah lebih terperinci dan transparan dibandingkan dengan tinjauan pustaka tradisional (Tranfield et al., 2003). SLR dilakukan dengan menggunakan protokol *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) yang telah dikembangkan hingga dasawarsa terakhir ini secara sistematis guna transparansi hasil dan pelaporannya (Page et al.,

2021).

Analisis Bibliometrik bertujuan untuk mengetahui pola keterkaitan antara ketiga literatur dan menelusuri intelektualitas lintas literatur tersebut (Donthu et al., 2021), sehingga didapatkan relevansi/keterkaitan antara literatur-literatur tersebut. Sedangkan Winarko & Sormin (2010) menegaskan bahwa bibliometrik merupakan penelaahan dengan mengaplikasikan matematika dan statistika untuk mengukur suatu dinamika pada sekumpulan dokumen maupun media lainnya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Hakim, 2020). Penelaahan terhadap kemunculan/keterjadian bersama/serentak (atau sering diistilahkan dalam Bahasa Inggris “*co-occurrence*”) suatu kata kunci (*keywords/terms*) dan pemetaan evolusi tematik dalam proses analisis bibliometrik bertujuan untuk menelusuri pergeseran dan perkembangan fokus dalam penelitian ini dan menghasilkan temuan yang akan memberikan wawasan mengenai dinamika penelitian, dan memberikan penekanan pada ruang lingkup baru serta topik-topik yang sedang berkembang dalam diskursus akademik (Wahid, 2024).

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari dokumen-dokumen berupa artikel yang telah dipublikasikan di jurnal ilmiah dan dokumen lainnya. Untuk pengumpulan ini digunakan aplikasi *Publish or Perish* (PoP), dengan *journal database* Google Scholar dan Scopus periode pencarian dokumen antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2024 (Rochman et al., 2023). Pencarian pada aplikasi PoP menggunakan kata kunci (*keywords/terms*) yang dipilih sesuai dengan tema dan maksud penelitian (Google Scholar (ekonomi syariah OR ekonomi islam AND ekonomi pertahanan AND migas OR minyak dan gas AND tambang* OR minerba OR mineral dan batubara OR sumber daya alam) (Chen et al., 2025). Sedangkan dokumen yang berasal dari *journal database* Scopus diperoleh dengan melakukan *export* langsung untuk memperoleh file sitasi .RIS-nya dari portal *search engine* sciencedirect.com dengan melakukan *advance search* (pilihan title, abstract, keywords: *islamic* OR *sharia* AND *defence* OR *defense* AND *economic* AND *natural resource*). File dengan tipe .RIS merupakan komponen penting dalam pengolahan data dengan analisis Bibliometrik yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi VOSviewer. Aplikasi VOSviewer lazim digunakan dalam analisis bibliometrik ini karena didesain untuk merepresentasikan bibliografi terhadap kumpulan data secara visual dengan cara memproses data pada file tipe .RIS ini, yang diperoleh dari penelusuran dokumen-dokumen pada *journal database* sebelumnya (Made et al., 2025).

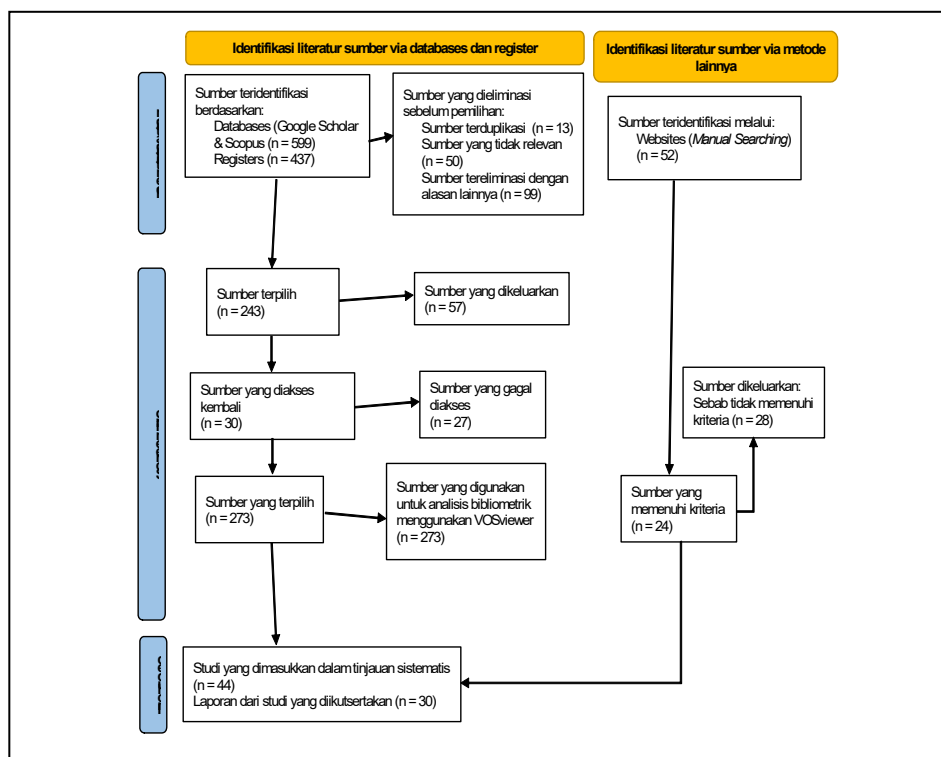
HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode SLR yang dipadukan dengan analisis bibliometrik untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan penelitian tentang relevansi ekonomi Islam dengan ekonomi pertahanan dalam kerangka pengelolaan sumber daya alam migas dan tambang di Indonesia. Pendekatan tersebut dipilih karena mampu mengintegrasikan analisis kualitatif terhadap substansi penelitian terdahulu dengan pemetaan terhadap struktur perkembangan ilmu pengetahuan.

Proses identifikasi dan seleksi literatur dilakukan dengan protokol PRISMA 2020, yang terdiri atas tahapan *identification*, *screening*, *eligibility*, dan *included*. Literatur diperoleh melalui Google Scholar, Scopus, *register*, serta *manual searching*. Selanjutnya dilakukan proses eliminasi terhadap artikel duplikat, artikel yang tidak memenuhi kriteria inklusi, dan artikel yang tidak relevan dengan fokus penelitian. Berdasarkan tahapan tersebut diperoleh 44 artikel yang memenuhi seluruh kriteria untuk dianalisis melalui SLR, sedangkan 273 artikel digunakan sebagai basis data analisis bibliometrik menggunakan perangkat lunak VOSviewer. Sehingga,

penelitian ini tidak hanya menyajikan sintesis terhadap penelitian-penelitian yang paling relevan, tetapi juga memetakan perkembangan ilmu secara lebih luas melalui jaringan hubungan antar kata kunci.

Gambar 2 PRISMA Chart of SLR 2020 Penelitian



Sumber: diolah peneliti, 2026

Hasil inventarisasi pustaka yang ditampilkan Gambar 2 diatas menunjukkan bahwa penelitian mengenai ekonomi pertahanan, ekonomi Islam/syariah, dan pengelolaan sumber daya alam berkembang dalam beberapa kelompok tema yang saling berkaitan, namun masih cenderung dikaji secara parsial. Kelompok pertama didominasi oleh penelitian mengenai pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan ekonomi yang menyoroti hubungan antara komoditas strategis, khususnya minyak dan gas bumi, dengan stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Misalnya, penelitian Alshammari et al., 2019) menunjukkan bahwa fluktuasi harga minyak memengaruhi efisiensi sektor asuransi dan takaful di negara-negara *Gulf Cooperation Council* (GCC), sedangkan penelitian Do et al. (2018) menjelaskan bahwa penguasaan sumber daya minyak oleh ISIS tidak secara otomatis menghasilkan kekuatan ekonomi maupun politik karena keterbatasan kapasitas kelembagaan dan teknologi. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa sumber daya alam memiliki nilai strategis yang sangat tinggi, tetapi manfaat ekonominya sangat bergantung pada kualitas tata kelola, kapasitas institusi, dan kondisi geopolitik. Temuan ini sejalan dengan teori *resource governance* dan *resource curse*, yaitu bahwa kekayaan sumber daya alam hanya akan menjadi modal pembangunan apabila dikelola melalui institusi yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Kelompok kedua memperlihatkan berkembangnya penelitian mengenai keuangan Islam

sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Berbagai penelitian tidak lagi memandang instrumen keuangan syariah hanya sebagai mekanisme investasi yang sesuai dengan prinsip agama, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik. Penelitian Rahman et al. (2020) menunjukkan bahwa *Socially Responsible Investment* (SRI) Sukuk memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala berupa tingginya risiko investasi, belum adanya standar pengukuran kinerja, dan rendahnya literasi investor. Sementara itu, Azrai Azaimi Ambrose et al. (2018) menunjukkan bahwa wakaf produktif, khususnya *cash waqf*, memiliki potensi sebagai sumber pembiayaan barang publik, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bahkan pertahanan, sehingga mampu mengurangi tekanan terhadap anggaran pemerintah. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa ekonomi syariah menawarkan instrumen pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan sosial (*public welfare*), sehingga relevan sebagai alternatif penguatan kapasitas fiskal negara.

Selanjutnya, hasil inventarisasi juga menunjukkan adanya kelompok penelitian yang membahas hubungan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan stabilitas ekonomi dan tata kelola negara. Penelitian Ghallabi et al. (2024) menemukan bahwa pasar modal syariah relatif lebih tahan terhadap risiko politik dibandingkan pasar konvensional karena karakteristiknya yang menghindari praktik riba, spekulasi berlebihan (*gharar*), dan transaksi yang tidak didukung aset riil. Di sisi lain, penelitian Hairunnisa (2022) menegaskan bahwa pembiayaan pembangunan yang terlalu bergantung pada utang luar negeri berpotensi menimbulkan tekanan terhadap stabilitas makroekonomi, sehingga ekonomi Islam mendorong optimalisasi sumber daya domestik, termasuk pengelolaan minyak bumi, gas alam, dan barang tambang sebagai sumber pembiayaan negara. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah tidak hanya memiliki dimensi normatif, tetapi juga memberikan kerangka praktis dalam membangun sistem fiskal yang lebih berkelanjutan.

Hasil sintesis literatur juga menunjukkan bahwa dimensi tata kelola (*governance*) merupakan tema yang muncul secara konsisten pada berbagai penelitian. M. U. Chapra (2008), melalui reinterpretasi teori pembangunan Ibn Khaldun, menjelaskan bahwa kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh keterpaduan antara keadilan, institusi yang kuat, tata kelola pemerintahan, pembangunan ekonomi, dan kepemimpinan politik. Ketidakadilan, lemahnya institusi, serta buruknya tata kelola dipandang sebagai penyebab utama kemunduran suatu peradaban. Perspektif tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan berbagai penelitian mengenai pengelolaan sumber daya alam yang menunjukkan bahwa korupsi, lemahnya pengawasan, dan ketidakpastian regulasi menjadi penyebab belum optimalnya penerimaan negara dari sektor ekstraktif. Dengan demikian, sintesis literatur mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan negara tidak cukup hanya dilakukan melalui eksploitasi sumber daya alam, tetapi harus disertai reformasi kelembagaan yang mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola.

Berikut merupakan tabel yang memuat 9 (sembilan) artikel jurnal yang dipilih berdasarkan hasil dilakukannya SLR dengan protokol PRISMA 2020 seperti telah dijelaskan sebelumnya. Kesembilan artikel ini merupakan artikel-artikel yang mewakili 44 artikel jurnal lainnya untuk keperluan penyajian hasil penelitian.

Tabel. 1 Daftar 9 Artikel Jurnal Hasil Analisis SLR (Protokol PRISMA 2020)

No.	Penulis	Tahun	Artikel Jurnal	
			Judul	Kontribusi Terhadap Penelitian
1	Lilik Rahmawati	2014	Pengelolaan Sumber Daya Migas Perspektif Islam	Menegaskan bahwa migas merupakan kepemilikan publik yang harus dikelola negara secara amanah dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
2	M. Umer Chapra	2008	<i>Ibn Khaldun's theory of development: Does it help explain the low performance of the present-day Muslim world?</i>	Menjelaskan keterkaitan antara keadilan, tata kelola, institusi, dan kesejahteraan sebagai pilar pembangunan negara.
3	Azniza Hartini Azrai Azaimi Ambrose, Mohamed Aslam Gulam Hassan dan Hanira Hanafi	2018	<i>A proposed model for waqf financing public goods and mixed public goods in Malaysia</i>	Menunjukkan potensi wakaf dalam pembiayaan barang publik dan pembangunan.
4	Mahfuzur Rahman, Che Ruhana Isa, Ginanjar Dewandaru, Mohamed Hisham Hanifa, Nazreen T. Chowdhury dan Moniruzzaman Sarker	2020	<i>Socially responsible investment sukuk (Islamic bond) development in Malaysia</i>	Menunjukkan bahwa instrumen keuangan syariah mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
5	Hairunnisa	2019	Dampak Utang Luar Negeri Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam	Menawarkan optimalisasi sumber daya alam sebagai alternatif terhadap ketergantungan pembiayaan eksternal.
6	Ahmad Alrazni Alshammara,	2019	<i>The impact of oil prices and the</i>	Menunjukkan hubungan erat antara sektor energi dengan

	Syed Musa Alhabshia dan Buerhan Saiti		<i>financial market on cost efficiency in the insurance and Takaful sectors in GCC</i>	stabilitas ekonomi dan lembaga keuangan Islam.
7	Quy-Toan Do, Jacob N. Shapiro, Christopher D. Elvidge, Mohamed Abdel-Jelil, Daniel P. Ahn, Kimberly Baugh, Jamie Hansen-Lewis, Mikhail Zhizhin, Morgan D. Bazilian	2018	<i>Terrorism, geopolitics, and oil security: Using remote sensing to estimate oil production of the Islamic State</i>	Menjelaskan bahwa penguasaan SDA memerlukan tata kelola dan kapasitas kelembagaan yang kuat sehingga memiliki implikasi terhadap keamanan nasional.
8	Walid M.A. Ahmed	2018	<i>How do Islamic versus conventional equity markets react to political risk? Dynamic panel evidence</i>	Menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam memiliki karakteristik yang mendukung ketahanan ekonomi ketika menghadapi risiko politik dan ekonomi.
9	Dedi Junaedi dan Faisal Salistia	2019	Reaktualisasi dan Revitalisasi Sumber Penerimaan Negara (Studi Kasus Postur APBN Indonesia)	Menjelaskan pentingnya optimalisasi sumber penerimaan negara dalam perspektif ekonomi Islam.

Sumber: diolah peneliti, 2026

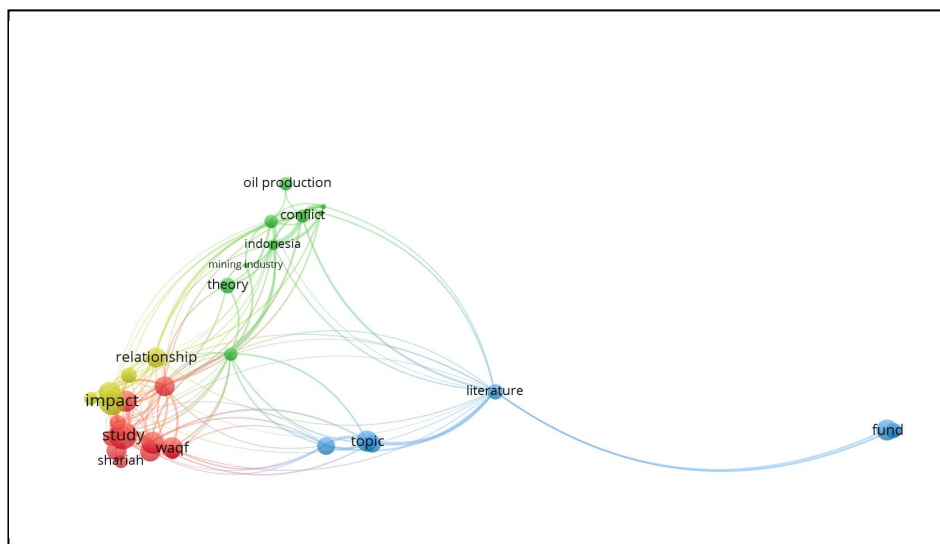
Kesembilan artikel tersebut membentuk tiga kelompok kajian utama. Kelompok pertama membahas tata kelola sumber daya alam migas dan tambang sebagai aset strategis negara. Kelompok kedua mengembangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti *maqāsid al-syarī'ah*, amanah, keadilan distributif, wakaf, dan sukuk sebagai dasar pengelolaan ekonomi yang berkeadilan. Kelompok ketiga membahas ketahanan ekonomi dan ekonomi pertahanan, khususnya mengenai pentingnya kapasitas negara dalam menjaga stabilitas nasional.

Sintesis tersebut menunjukkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi yang signifikan pada masing-masing bidang. Namun, hubungan konseptual antara ketiga kelompok kajian tersebut masih terbatas. Dengan demikian, hasil sintesis literatur memberikan indikasi awal bahwa masih terdapat ruang penelitian untuk mengintegrasikan ekonomi Islam, ekonomi pertahanan, dan tata kelola sumber daya alam dalam satu kerangka analisis yang utuh.

Analisis bibliometrik terhadap literatur jurnal internasional menunjukkan bahwa

perkembangan penelitian didominasi oleh tiga klaster utama, yaitu **ekonomi energi**, **keuangan Islam**, dan **pembangunan ekonomi**. Dominasi kata kunci seperti *oil price*, *uncertainty*, *economy*, *Islamic economic*, *waqf*, *fund*, dan *country* menunjukkan bahwa perhatian peneliti internasional lebih banyak diarahkan pada hubungan antara dinamika energi global dengan pengembangan instrumen keuangan Islam dalam mendukung pembangunan ekonomi.

Gambar 3 Visualisasi Jaringan Analisis Bibliometrik (Co-Occurance) Output Aplikasi VosViewer Untuk Literatur Jurnal Internasional

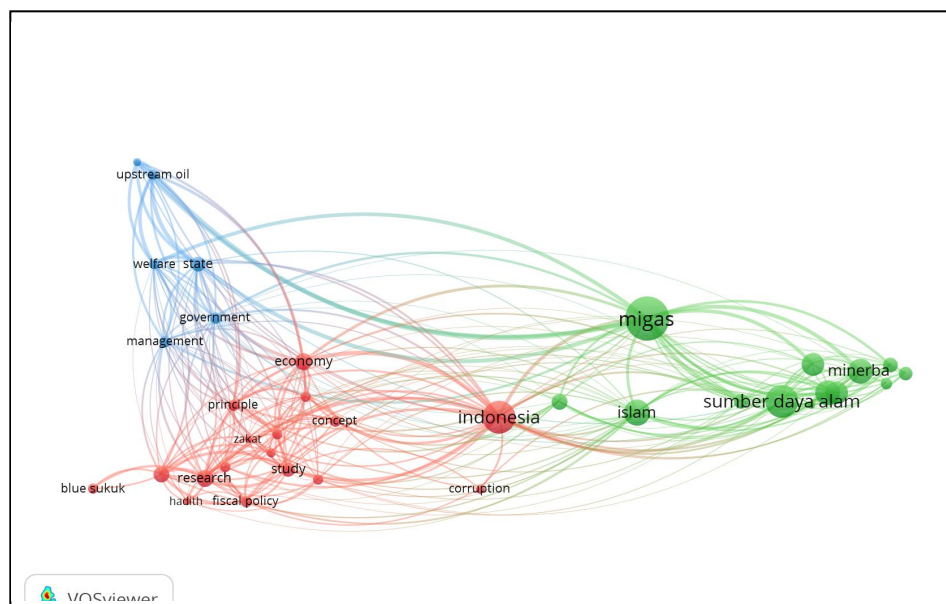


Sumber: Output aplikasi VosViewer yang diolah peneliti, 2026

Pola tersebut mengindikasikan bahwa literatur jurnal internasional berkembang dalam kerangka **global energy–Islamic finance**. Energi diposisikan sebagai sumber daya strategis yang memengaruhi stabilitas ekonomi, sedangkan ekonomi Islam berkembang melalui inovasi instrumen pembiayaan seperti sukuk, wakaf, dan lembaga keuangan syariah. Meskipun demikian, analisis jaringan menunjukkan bahwa konsep **defense economics** belum memiliki keterhubungan yang kuat dengan kedua kelompok tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara ekonomi Islam, energi, dan ekonomi pertahanan masih merupakan bidang penelitian yang relatif baru.

Berbeda dengan literatur jurnal internasional, hasil analisis bibliometrik terhadap literatur jurnal nasional menunjukkan dominasi kata kunci **migas**, **Indonesia**, **sumber daya alam**, **minerba**, **pertambangan**, **ekonomi**, **Islam**, **pertahanan negara**, **fiscal policy**, dan **blue sukuk**.

Gambar 4. Visualisasi Jaringan Analisis Bibliometrik (*Co-Occurance*) Output Aplikasi VosViewer Untuk Literatur Jurnal Nasional



Sumber: Output aplikasi VosViewer yang diolah peneliti, 2026

Dominasi kata kunci tersebut menunjukkan bahwa penelitian di Indonesia lebih banyak berorientasi pada **pengelolaan sumber daya alam sebagai sumber penerimaan negara**. Di sisi lain, kemunculan kata kunci ekonomi Islam dan instrumen syariah menunjukkan mulai berkembangnya perhatian terhadap aspek normatif dan etis dalam pengelolaan ekonomi nasional. Namun demikian, hubungan antara ekonomi Islam dan ekonomi pertahanan masih belum membentuk jaringan penelitian yang kuat sehingga menunjukkan adanya kesenjangan konseptual yang masih perlu dikembangkan.

Hasil analisis bibliometrik memperlihatkan adanya perbedaan orientasi perkembangan penelitian antara literatur jurnal internasional dan nasional. Literatur jurnal internasional berkembang dari perspektif *global energy–Islamic finance*, sedangkan literatur jurnal nasional berkembang dari perspektif *resource governance–state finance*. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa fokus penelitian internasional lebih diarahkan pada dinamika energi global, risiko ekonomi, dan pengembangan instrumen keuangan Islam, sementara penelitian nasional lebih menitikberatkan pada optimalisasi pengelolaan migas dan tambang sebagai sumber penerimaan negara dan penguatan kebijakan fiskal.

Meskipun memiliki fokus yang berbeda, kedua kelompok literatur jurnal tersebut memiliki titik temu pada pentingnya tata kelola sumber daya alam. Tata kelola dalam literatur jurnal internasional dipandang sebagai faktor yang menentukan efektivitas pemanfaatan sumber daya energi untuk pembangunan. Sedangkan dalam literatur jurnal nasional, tata kelola menjadi prasyarat bagi optimalisasi penerimaan negara dan keberlanjutan pembangunan. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa **tata kelola sumber daya alam** merupakan simpul yang dapat menghubungkan ekonomi Islam dengan ekonomi pertahanan.

Hasil sintesis literatur dan analisis bibliometrik menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam migas dan tambang merupakan titik temu konseptual antara ekonomi Islam dan ekonomi pertahanan. Dalam perspektif ekonomi pertahanan, sumber daya alam merupakan aset strategis yang mendukung ketahanan ekonomi nasional, memperkuat kapasitas fiskal negara, dan

meningkatkan kemampuan negara dalam menjaga kedaulatan. Ketahanan ekonomi yang kuat merupakan salah satu komponen strategis bagi penyelenggaraan sistem pertahanan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, ekonomi Islam memandang sumber daya alam sebagai amanah yang harus dikelola sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Prinsip-prinsip seperti amanah, keadilan distributif, transparansi, akuntabilitas, serta larangan gharar dan riba menempatkan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi Islam memberikan dimensi etik terhadap pengelolaan migas dan tambang, sedangkan ekonomi pertahanan memberikan dimensi strategis mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya tersebut bagi keberlangsungan negara.

Relevansi ekonomi Islam terhadap ekonomi pertahanan dalam kesimpulannya tidak semata-mata terletak pada aspek pembiayaan pertahanan, melainkan pada kesamaan tujuan kedua disiplin ilmu dalam membangun ketahanan nasional melalui tata kelola sumber daya strategis yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Pengelolaan migas dan tambang yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam berpotensi memperkuat ketahanan ekonomi nasional, yang pada gilirannya menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung ekonomi pertahanan.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penelitian ini mengidentifikasi bahwa perkembangan literatur masih berlangsung dalam tiga rumpun yang relatif terpisah. Literatur jurnal internasional lebih banyak membahas hubungan antara energi dan keuangan Islam, sedangkan literatur jurnal nasional lebih menekankan tata kelola sumber daya alam dan kebijakan fiskal. Pada sisi lain, ekonomi pertahanan berkembang sebagai bidang kajian tersendiri yang umumnya membahas ketahanan ekonomi, kapasitas fiskal, dan strategi pertahanan tanpa banyak mengaitkannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini belum banyak penelitian yang secara komprehensif menjelaskan relevansi ekonomi Islam dengan ekonomi pertahanan dalam kerangka pengelolaan sumber daya alam migas dan tambang di Indonesia. Kesenjangan inilah yang menjadi ruang kontribusi penelitian ini. Agar posisi penelitian lebih jelas, hasil sintesis dapat diringkas pada Tabel berikut.

Tabel. 2 Ringkasan Hasil Analisis dan Sintesis Penelitian

No.	Aspek	Jurnal Internasional	Jurnal Nasional	Kontribusi Penelitian
1	Fokus utama	Energi global dan keuangan Islam	Tata kelola SDA, PNB, dan kebijakan fiskal	Integrasi ekonomi Islam dan ekonomi pertahanan dalam tata kelola migas dan tambang.
2	Perspektif	<i>Global energy–Islamic finance</i>	<i>Resource governance–state finance</i>	<i>Islamic economics–defense economics–natural resource governance.</i>
3	Kesenjangan	Belum mengaitkan energi dan ekonomi Islam dengan ekonomi	Belum menghubungkan tata kelola SDA dengan prinsip ekonomi Islam	Menawarkan sintesis konseptual yang menjadikan tata kelola SDA sebagai jembatan antara ekonomi Islam dan

pertahanan dan ekonomi ekonomi pertahanan
pertahanan secara
terpadu

Sumber: diolah peneliti, 2026

Berdasarkan sintesis tersebut, kontribusi utama penelitian ini bukan hanya memetakan perkembangan literatur melalui SLR (dengan protokol PRISMA 2020) dan analisis bibliometrik, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual baru yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam migas dan tambang sebagai titik temu antara ekonomi Islam dan ekonomi pertahanan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kerangka ini berfungsi sebagai landasan normatif yang mengarahkan tata kelola sumber daya alam agar berlangsung secara amanah, adil, transparan, dan berkelanjutan, sedangkan ekonomi pertahanan memberikan perspektif strategis mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya tersebut bagi penguatan ketahanan ekonomi nasional dan keberlangsungan pertahanan negara.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis relevansi ekonomi Islam dengan ekonomi pertahanan dalam kerangka pengelolaan sumber daya alam migas dan tambang di Indonesia melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dan analisis bibliometrik. Dari 44 artikel (yang direpresentasikan melalui 9 artikel utama) yang dianalisis secara sistematis dan 273 artikel yang dipetakan dengan VOSviewer, penelitian ini menyajikan sintesis komprehensif mengenai perkembangan literatur. Hasil menunjukkan bahwa literatur jurnal internasional lebih banyak membahas ekonomi energi dan keuangan Islam, sementara literatur jurnal nasional berfokus pada tata kelola sumber daya alam, penerimaan negara, dan kebijakan fiskal. Kajian ekonomi pertahanan berkembang relatif terpisah dari kedua bidang tersebut. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan penelitian, yaitu belum banyak kajian yang mengintegrasikan ekonomi Islam, ekonomi pertahanan, dan tata kelola sumber daya alam secara terpadu.

Sintesis penelitian memperlihatkan bahwa pengelolaan migas dan tambang merupakan titik temu konseptual antara ekonomi Islam dan ekonomi pertahanan. Ekonomi Islam menekankan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, keadilan distributif, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan, sedangkan ekonomi pertahanan menekankan penguatan ketahanan ekonomi nasional untuk menjaga kedaulatan. Kedua perspektif ini saling melengkapi dalam membangun ketahanan nasional melalui tata kelola sumber daya strategis. Kontribusi utama penelitian adalah penyusunan model konseptual yang menempatkan tata kelola migas dan tambang sebagai jembatan antara ekonomi Islam dan ekonomi pertahanan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam dijadikan landasan normatif untuk tata kelola yang berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga mendukung ketahanan ekonomi nasional sebagai fondasi ekonomi pertahanan.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas diskursus multidisipliner dengan mengintegrasikan dimensi ekonomi, tata kelola, dan pertahanan. Secara praktis, hasil penelitian menegaskan bahwa penguatan tata kelola migas dan tambang tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan kekayaan negara, tetapi juga mendukung ketahanan ekonomi nasional yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan strategis pembangunan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan studi literatur dan analisis bibliometrik tanpa pengujian empiris. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan model empiris yang menguji pengaruh penerapan prinsip ekonomi Islam terhadap indikator ketahanan ekonomi dan pertahanan, memperluas objek kajian ke sektor sumber daya alam lain, serta melakukan analisis komparatif antarnegara kaya sumber daya.

DAFTAR REFERENSI

- Afifullah, M., & Triadi, I. (2023). Penerapan Hukum Ekonomi Kerakyatan Syariah Sebagai Fundamental Pertahanan Negara Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2610>
- Al-Ghazali, I. (1997). *Al-Mustashfa Jilid 1: Rujukan Utama Ushul Fikih*. Pustaka Al-Kautsar. <https://books.google.co.id/books?id=WJ6UEAAAQBAJ>
- Alshammari, A. A., Alhabshi, S. M., & Saiti, B. (2019). The Impact of Oil Prices and The Financial Market on Cost Efficiency in The Insurance and Takaful Sectors: Evidence from A Stochastic Frontier Analysis. *Economic Systems*, 43(3–4), 100716. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2019.100716>
- Al-Shatibi, A. I. (1920). *Al-Muwafaqat fi usul al-shari'ah*. Matba'at al maktabah al-tujariyah. <https://books.google.co.id/books?id=ws2C0AEACAAJ>
- Ayub, M. (2009). *Understanding Islamic Finance*. Wiley. <https://books.google.co.id/books?id=HjwL-vOKEVQC>
- Azrai Azaimi Ambrose, A. H., Gulam Hassan, M. A., & Hanafi, H. (2018). A proposed model for waqf financing public goods and mixed public goods in Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(3), 395–415. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2017-0001>
- Beekun, R. I. (2006). *Islamic Business Ethics*. International Institute of Islamic Thought. <https://books.google.co.id/books?id=kiVcCgAAQBAJ>
- Bolouri, A. A., Lohse, T., & Qari, S. (2025). Interdependent Preferences for Financing and Providing Public Goods—The Case of National Defense. *Kyklos*, 78(3), 807–821. <https://doi.org/10.1111/kykl.12442>
- Capri, W., Dhian Cahyati, D., Hasanah, M., Prasongko, D., & Prasetyo, W. (2021). Kajian Korupsi sebagai Proses Sosial: Melacak Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 121–142. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.730>
- Chapra, M. U. (2008). Ibn Khaldun's Theory of Development: Does It Help Explain The Low Performance of The Present-day Muslim World? *Journal of Socio-Economics*, 37(2), 836–863. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2006.12.051>
- Chapra, U. M. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation. <https://books.google.co.id/books?id=0NGpDAAAQBAJ&lpg=PR11&ots=298iYJDQHT&dq=info%3A XuK0UWfdl1EJ%3A scholar.google.com&lr&pg=PR2#v=onepage&q&f=false>
- Chen, M., Samat, N., Javad, M., Tilaki, M., & Duan, L. (2025). Land use / cover change simulation research: A system literature review based on bibliometric analyses. *Ecological Indicators*, 170(December 2024), 112991. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2024.112991>
- Do, Q. T., Shapiro, J. N., Elvidge, C. D., Abdel-Jelil, M., Ahn, D. P., Baugh, K., Hansen-Lewis, J., Zhizhin, M., & Bazilian, M. D. (2018). Terrorism, Geopolitics, and Oil Security: Using Remote Sensing to Estimate Oil Production of The Islamic State. *Energy Research and Social Science*, 44(December 2017), 411–418. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.03.013>
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285–296. <https://doi.org/10.1016/J.JBUSRES.2021.04.070>
- Ghallabi, F., Ghorbel, A., Kumar, S., & Sharif, A. (2024). Measuring Risk Transmission

- Between International Oil and Islamic Stock Markets: A Comparative Analysis with The Gold Markets. *International Review of Economics and Finance*, 95, 103465. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.103465>
- Hairunnisa. (2022). Dampak Utang Luar Negeri Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal La Riba: Jurnal Perbankan Syariah*, 15(2), 57–69. <http://www.tugassekolah.com/2017/10/manfaat-dan-dampak-negatif-utang-luar.html>
- Hakim, L. (2020). Bibliography Analysis of Business Incubator Research in Scientific Indexed By Scopus. *Procuratio : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 8(2). <https://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/PROCURATIO/index>
- IMF. (2022). *Fiscal Monitor: Helping People Bounce Back*. Wwww.Imf.Org. <https://www.imf.org/en/publications/fm/issues/2022/10/09/fiscal-monitor-october-22>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley. <https://books.google.co.id/books?id=SbVUt5X0R5MC>
- Made, N., Dwijayanti, A., Hudaya, R., & Dewi, T. K. (2025). *Relevansi Penerapan ESG Bagi Perusahaan : Systematic Literature Review*. 9(April), 1049–1058.
- Manohara, B. P., & Hayati, T. (2022). *Optimalisasi Regulasi dan Institusi dalam Pengelolaan Hulu Migas*. Rajawali Pers. https://books.google.co.id/books?id=_d5zEQAAQBAJ&lpg=PP1&ots=Du8Z_j8luQ&dq=regulasi migas&lr&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q=regulasi migas&f=false
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement : an updated guideline for reporting systematic reviews Systematic reviews and Meta-Analyses. *BMJ*. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Rahman, M., Isa, C. R., Dewandaru, G., Hanifa, M. H., Chowdhury, N. T., & Sarker, M. (2020). Socially responsible investment sukuk (Islamic bond) development in Malaysia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 12(4), 599–619. <https://doi.org/10.1108/QRFM-09-2019-0117>
- Rochman, A., Sutryani, H., Dewi, A. K., Dwiyanto, A., Nurlukman, & Fadli, Y. (2023). Relevansi Sistem Biopori Dalam Upaya Penanganan dan Pencegahan Banjir Melalui Analisis Bibliometrik. *Community Services and Social Work Bulletin*. <https://doi.org/10.31000/cswb.v3i2.10505>
- Samuelson, P. A. (1955). Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure. *The Review of Economics and Statistics*, 37, 52–65. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:54666972>
- Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). *Economics of the Public Sector*. W. W. Norton. <https://books.google.co.id/books?id=WjMCuQEACAAJ>
- Subianto, P. (2023). Paradoks Indonesia dan Solusinya. In D. Setiawan (Ed.), *Digital Version* (1st Ed, Vol. 1). PT. Media Pandu Bangsa.
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review *. *British Journal of Management*, 14. [https://josephmahoney.web.illinois.edu/BADM504_Fall2019/6_Tranfield,DenyerandSmart\(2003\).pdf](https://josephmahoney.web.illinois.edu/BADM504_Fall2019/6_Tranfield,DenyerandSmart(2003).pdf)
- Umam, A. K., Hidayati, N., Yazid, F., Kartodihardjo, K., Sartono, Syeirazi, K., Primayogha, E., & Razak, M. I. (2021). *Kuasa Oligarki Atas Minerba Indonesia Analisis Pasca*

-
- Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba (Tim Penulis) (Z-Library)*. Universitas Paramadina.
- Wahid, S. H. (2024). Exploring the intersection of Islam and digital technology: A bibliometric analysis. *Social Sciences & Humanities Open*, 10, 101085. <https://doi.org/10.1016/J.SSAHO.2024.101085>
- Winarko, B., & Sormin, R. (2010). Telaah Bibliometrik Komoditas Padi. *Jurnal Perpustakaan Pertanian*, 19(2).
- Yusgiantoro, P. (2014). *Ekonomi Pertahanan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zulkadrin, Z., Citra, A. A., Rahmawati, R., & Putri, O. A. (2025). Hypothetical Inflation Shock Analysis: Macroeconomic Impacts and Policy Responses at the Onset of Prabowo Subianto's Administration, Indonesia 2025. *AL-AMIYAH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(02), 187–202.